



KEPALA DESA PERON
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

PERATURAN KEPALA DESA PERON
NOMOR 05 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA (BLT -DD) DESA PERON
KECAMATAN LIMBANGAN

KEPALA DESA PERON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24A ayat (2) huruf b angka 1 bahwa untuk penyaluran bulan pertama 15% (lima belas persen) dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Nomor : 07 Tahun 2020 pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 Tentang penetapan calon Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT - DD) Desa Peron;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Peron Kecamatan Limbangan tentang Penetapan Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT - DD) Desa Peron Kecamatan Limbangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kendal dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor : 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor : 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor : 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
24. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);
25. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA PERON TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
8. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
9. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
10. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
11. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
16. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
17. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara

- lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
18. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
 19. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
 20. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepala keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

BAB II TATA CARA PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); dan/atau
 - b. Bantuan langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Pasal 4

- (1) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa BLT-Dana Desa diberikan kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerima BLT-Dana Desa adalah :
 - a. Belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja;
 - b. Merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan; serta
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa PERON

Ditetapkan di : Peron
Pada tanggal : 30 April 2020
Penjabat Kepala Desa Peron

Cap ttd

PUJI TRI TITI PRAYITNO

Diundangkan di : Peron
Pada tanggal : 30 April 2020
Sekretaris Desa Peron



BERITA DESA PERON TAHUN 2020 NOMOR 04

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA PERON
NOMOR : 05 TAHUN 2020
TANGGAL : 29 APRIL 2020

DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DESA PERON
KECAMATAN LIMBANGAN
TAHUN 2020

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	KET
1	2	3	4	5
1	Turijan	3324063112640020	Krajan RT 1 RW 1	
2	Rukini	3324065505720002	Krajan RT 1 RW 1	
3	Yahya Safaudin	3324063103680002	Krajan RT 2 RW 1	
4	Rondi	3324060309600002	Krajan RT 3 RW 3	
5	Pariyadi	3324062011860001	Krajan RT 3 RW 1	
6	Tasmin	3324061201500002	Krajan RT 3 RW 1	
7	Abdul Sahid	3324060812750001	Krajan RT 3 RW 1	
8	Suryati	3324064712660001	Krajan RT 2 RW 2	
9	Darmi	3324066411780002	Krajan RT 2 RW 2	
10	Sulami	1405024208830006	Krajan RT 2 RW 1	
11	Sukuri	3324061410750001	Krajan RT 2 RW 2	
12	Pribadi	3324062810580001	Krajan RT 1 RW 2	
13	Ahmad Kamaludin	3324061303760001	Krajan RT 1 RW 2	
14	Zamri	3324060501630002	Krajan RT 1 RW 2	
15	Mintoro	3324061008700002	Krajan RT 1 RW 2	
16	Fitri afrianti	3324165504870002	Krajan RT 1 RW 2	
17	Asrofi	3324062307840003	Krajan RT 1 RW 2	
18	Parto	3324060104720001	Krajan RT 1 RW 3	
19	Wakidin	3324060510630001	Krajan RT 2 RW 3	
20	Mukabiron	3324063112650040	Krajan RT 3 RW 3	
21	Nurmachin HP	3324060303770001	Krajan RT 3 RW 3	
22	Hariyati	3324065109850002	Krajan RT 3 RW 3	

23	Norcahyo	3374082206870004	Krajan RT 2 RW 3	
24	Dwi Purwaningsih	3324064404770002	Krajan RT 4 RW 3	
25	Feriyatno	3324060808850001	Krajan RT 4 RW 3	
26	Istuhri	3324062709710001	Krajan RT 4 RW 3	
27	Toeron	3324061607680003	Krajan RT 4 RW 3	
28	M. Nasir	3324063006880001	Krajan RT 1 RW 4	
29	Rusminah	3324064206710001	Krajan RT 1 RW 4	
30	Muhlasin	3324060602760004	Krajan RT 1 RW 4	
31	Mas'udin	3324061302840001	Krajan RT 2 RW 4	
32	Mohamad Ali	3321102204830003	Krajan RT 2 RW 4	
33	Agustinus	3324061508640003	Krajan RT 2 RW 4	
34	Lukman nurhakim	3324062062750002	Krajan RT 3 RW 4	
35	Sunatun	3324064103660002	Krajan RT 3 RW 4	
36	Tri Susanah	3324065505960001	Krajan RT 3 RW 4	
37	Ramini	3324064110580002	Kebon Getas RT 1 RW 5	
38	Warti	3324064508520001	Kebon Getas RT 1 RW 5	
39	Turini	3324065206460001	Kebon Getas RT 1 RW 5	
40	Purwanto	3324063108600001	Kebon Getas RT 1 RW 5	
41	Supriyadi	3324060402670002	Kebon Getas RT 2 RW 5	
42	Eni Susanti	3324064710820004	Kebon Getas RT 2 RW 5	
43	Khomisah	3324066001770001	Nampu Rt 01/06 Peron	
44	Ahmad ista'in	3324062006690001	Nampu Rt 01/06 Peron	
45	Jumiyanto	3324060504850001	Nampu Rt 01/06 Peron	
46	Turiyem	3324065106530001	Nampu Rt 02/06 Peron	
47	Senah	3324066411510001	Nampu Rt 02/06 Peron	
48	Yamsah	3324065509580001	Nampu Rt 02/06 Peron	
49	Samiun	3324061505830001	Nampu Rt 03/06 Peron	
50	Salam Mukhozin	3324060705810001	Nampu Rt 03/06 Peron	
51	Parti	3324065608600001	Nampu Rt 02/06 Peron	
52	Rumiyatun	3324066812680000	Ketro Rt 01/07 Peron	

53	Kaolan	3324063008790001	Ketro Rt 01/07 Peron	
54	Trimo	3324062109650001	Ketro Rt 01/07 Peron	
55	Karman	3324061204710004	Ketro Rt 01/07 Peron	
56	Purwati	3324066011910001	Ketro Rt 02/07 Peron	
57	Wahyu Utomo	3324062505880001	Ketro Rt 02/07 Peron	
58	Andi sofiyanto	3324061510950001	Ketro Rt 02/07 Peron	
59	Harti	3324066005460001	Ketro Rt 03/07 Peron	
60	Yatin	3324060309590001	Ketro Rt 03/07 Peron	
61	Tego	3324061708650001	Ketro Rt 03/07 Peron	
62	Sulimah	3324065105480001	Ketro Rt 04/07 Peron	
63	Mubi	3324060306540001	Ketro Rt 04/07 Peron	
64	Sri lestari	3324064605810001	Ketro Rt 04/07 Peron	
65	Riqi Ariyanto	3324063110920001	Ketro Rt 05/07 Peron	
66	Dani Eko Prasilyo	3324061803920001	Ketro Rt 05/07 Peron	
67	Slamet waliyadi	3324060603830002	Ketro Rt 04/08 Peron	
68	Hendro Santoso	3324061004870002	Ketro Rt 01/08 Peron	
69	Ahmad Akadi	3324060404770002	Ketro Rt 01/08 Peron	
70	Poniyah	3324066507560001	Ketro Rt 02/08 Peron	
71	Budi prayitna	3309181507910001	Ketro Rt 02/08 Peron	
72	Siyaman	3324060305900001	Ketro Rt 02/08 Peron	
73	Asriwayati	3324066710730004	Ketro Rt 01/08 Peron	
74	Bejo	3324061208630002	Ketro Rt 03/08 Peron	
75	Sriyati	3324064709650002	Ketro Rt 03/08 Peron	
76	Ratemi	3324065505600002	Ketro Rt 04/08 Peron	
77	Kemi	3324065006640002	Ketro Rt 04/08 Peron	
78	Wagini	3324066012550002	Ketro Rt 04/08 Peron	
79	Panuju Leksono	3309180304840001	Manggung RT 001/009	
80	Sariyem	3324064206650001	Manggung RT 001/009	
81	Tugiyono	8271021003710006	Manggung RT 001/009	
82	Yanto Kosasi	3324060210530001	Manggung RT 002/009	

83	Jarwati	3324064805760001	Manggung RT 002/009	
84	Sainem	3324065407720002	Manggung RT 002/009	
85	Si'i	3324060507540001	Manggung RT 003/009	
86	Sarju	3324060709400001	Manggung RT 003/009	
87	Pardi	3324060502560001	Manggung RT 003/009	
88	Wardi	3324061812650001	Manggung RT 004/009	
89	Trimo	3324060503800002	Manggung RT 004/009	
90	Yamti	3324065510630001	Manggung RT 004/009	
91	Pardi	6301070207660002	Manggung RT 005/010	
92	Ariyadi	3324061406860001	Manggung RT 005/010	
93	Pariyadi	3324060206860001	Manggung RT 005/010	
94	Sutrisno	3324061204690005	Manggung RT 006/010	
95	Kamdi	3324062703700003	Manggung RT 006/010	
96	Wasono	3324062109630002	Manggung RT 006/010	
97	Triyati	3324065002830001	Manggung RT 007/010	
98	Jumini	3324064107550002	Manggung RT 007/010	
99	Susanto	3324062112880001	Manggung RT 007/010	

Penjabat Kepala Desa Peron

Cap ttd

PUJI TRI TITI PRAYITNO

Diundangkan di : Peron

Pada tanggal : 30 April 2020

Sekretaris Desa Peron



MUGHLASIN